

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah Sri Juni Woro Astuti.....	85–94
Media Pers Lokal Melawan Korupsi Dwiyanto Indiahono	95–101
Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Machya Astuti Dewi	102–111
Kampanye Calon Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu 2009 Wahidah Zein Br Siregar	112–118
Upaya Pengentasan Kemiskinan di Madura sebagai Model Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Ekna Satriyati dan Devi Rahayu.....	119–129
Penyusunan Kebijakan <i>Partnership</i> dan <i>Development</i> dalam Pemanfaatan Dana BUMN untuk Pengembangan UKM Priyono Tri Febrianto.....	130–138
<i>Social Early Warning System</i> untuk Mengantisipasi Konflik Sosial di Masyarakat Karnaji, Septi Ariadi, Soebagyo Adam, dan Siti Mas'udah	139–151
Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar <i>Issue Global Warming</i> pada Masyarakat Tamping Moch. Jalal	152–161
Study on Islamic Literature Viewed from Theosophical Perspective Amir Fatah	162–167

Media Pers Lokal Melawan Korupsi

Dwiyanto Indiahono¹

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ABSTRACT

This paper assumes that corruption is one of the main enemies of good governance. One of the pillars of good governance is an independent, clean and reliable mass media. Using content analysis on Radar Banyumas of September and October of 2008, this paper discusses the content of news of corruption done by local public officials in the local mass media, and the public liability resulting from criminal acts of corruption at the local level in the local mass media perspective. This paper shows that news on corruption in Radar Banyumas still used language that is biased and pro corruptive actors. To make the mass media stronger in dealing with corruption, this paper suggests that there is a need to improve mass media professionalism.

Key words: corruption, good governance, local mass media, Banyumas

Reformasi sektor publik di Indonesia mulai mengemuka seiring runtuhnya pemerintahan yang cenderung sentralistik dan bertangan besi. Hasil dari pemerintahan yang sentralistik dan bertangan besi adalah tidak memberikan ruang kepada publik untuk

ikut serta dalam proses penyelenggaraan urusan-urusan publik. Reformasi sektor publik diharapkan dapat membawa perubahan ke arah *good governance* yang berlandaskan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Era orde baru yang sangat otonom

Tabel 1.
Catatan Korupsi dan Koruptor Tahun 2005–2007

Tahun 2005		
Kasus dan Terdakwa	Jumlah kasus	69 kasus
	Jumlah terdakwa	239 orang
Hukuman	Vonis bebas	27 kasus
	Vonis bersalah: 42 kasus	• Divonis di bawah 2 tahun: 23 • Di atas 2 tahun hingga 5 tahun: 14 • Di atas 5 tahun: 5
Aktor	Eksekutif (kepala daerah, mantan kepala daerah, dinas dsb)	27 Kasus
	Legislatif (mantan, anggota DPR/D dan MPR)	28 Kasus
	Swasta	14 Kasus
Tahun 2006		
Kasus dan Terdakwa	Jumlah kasus	124 kasus
	Jumlah terdakwa	361 orang
Hukuman	Vonis bebas	27 kasus
	Vonis bersalah: 85 kasus	• Divonis di bawah 2 tahun: 37 kasus (29,8%) • Di atas 2 tahun hingga 5 tahun: 32 kasus (25,8%) • Di atas 5 tahun: 16 kasus (12,9%)
Aktor	Eksekutif (kepala daerah, mantan kepala daerah, dinas dsb)	54 Kasus
	Legislatif (mantan, anggota DPR/D dan MPR)	35 Kasus
	Swasta	35 Kasus
Tahun 2007		
Kasus dan Terdakwa	Jumlah kasus	166 kasus
	Jumlah terdakwa	373 orang
Hukuman	Vonis bebas	212 orang
	Vonis bersalah: 161 terdakwa	• 66 terdakwa dijatuhi vonis hanya satu tahun

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber (2008)

¹ Korespondensi: D. Indiahono, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Alamat: Jl. Prof. DR. H. Bunyamin 993 Purwokerto – Indonesia 53122. E-mail: indiahono@yahoo.com.

dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah membuahkan tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dikarenakan akuntabilitas dibangun lewat mekanisme internal tanpa adanya kontrol dari pihak luar.

Peristiwa tingginya tindak pidana korupsi secara ideal diharapkan ikut turun pasca lengsernya orde baru. Namun, hingga sepuluh tahun bergulirnya reformasi, angka korupsi tetap tinggi. Hal ini menarik untuk dicermati, karena ketika sendi-sendi demokrasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik terus didengungkan tidak serta merta menurunkan tindak pidana korupsi ini. Berikut adalah tabel catatan korupsi dari tahun 2005 hingga tahun 2007.

Data tentang korupsi dan koruptor di Indonesia diperparah dengan banyaknya pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pejabat publik yang terlibat terdiri dari pejabat eksekutif maupun legislatif. Data tindak pidana korupsi pada tahun 2007 bahkan menunjukkan kepala daerah sebagai pelaku korupsi yang dominan. Dari 143 kasus dalam catatan pusat kajian anti (pukat) korupsi fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, sebanyak 69 kasus di antaranya melibatkan kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah tujuh orang gubernur/mantan gubernur, 47 bupati/mantan bupati, enam walikota/mantan walikota, enam wakil bupati, dan tiga wakil walikota. Selain itu, sebanyak 31 pejabat pemerintah daerah terlibat korupsi. Delapan di antaranya merupakan kepala dinas dan dua orang sekretaris daerah. Anggota DPR/DPRD yang terlibat korupsi adalah sebanyak 27 orang (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0712/29/nas09.htm>, diakses tanggal 27 Maret 2008).

Angka nominal yang dikorupsi dari tahun ke tahun meskipun tidak selalu meningkat namun cukup memprihatinkan. Di tahun 2006 saja, menurut ICW kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp. 14,1 Trilyun. Sektor yang terkorup menurut ICW adalah sektor pemerintahan, disusul sektor perhubungan dan transportasi, perumahan dan pertanahan (<http://www.erasmuslim.com/berita/nas/7124143359-icw-tingkat-korupsi-2006-naikdrastis.htm?prev> diakses tanggal 27 Maret 2008).

Satu sisi yang menarik adalah bahwa desentralisasi justru memicu lahirnya perilaku yang tidak akuntabel dan tidak transparan. *"There are many studies available which show that decentralisation's promise to bring more accountability and transparency in the political process is hard to fulfil"* (Ionita 2005). Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan elit politik di tingkat

pusat dan berskala besar saja, melainkan juga harus sudah mulai dilihat sebagai ancaman yang bersifat lokal dengan skala kecil.

'Transparency is ...a key element ...and in vision of open executive government as a necessary entailment of democracy and legality. Transparency is central to contemporary discussions of both democratic governance and public sector reform, since open access to information and the elimination of secrecy is taken to be a condition for the prevention of corruption and promoting public accountability' (Hood 2001:725).

World Bank mendefinisikan korupsi sebagai *"the abuse of public office for privat gain"* (World Bank dalam Arikan 2004). Korupsi dengan amat vulgar telah berhadap-hadapan dengan upaya menegakkan tata pemerintahan yang baik yang menghendaki transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Korupsi dengan sendirinya turut menghambat upaya pemerintah dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Korupsi merupakan salah satu musuh utama bagi penegakan *good governance*. Sehingga jika sendi-sendi dari *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik ingin ditegakkan secara sungguh-sungguh, maka diperlukan pilar-pilar *good governance* yang berdiri kokoh. Salah satu dari pilar *good governance* adalah upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas yang dibangun melalui media atau pers yang independen, bersih dan terpercaya.

Kajian di Afrika Selatan menunjukkan bahwa efek dari korupsi berdampak sangat serius pada pembangunan ekonomi dan secara signifikan memengaruhi upaya menegakkan *good governance*. *"The effect of corruption in South Africa has seriously constrained development of the national economy and has significantly inhibited good governance in the country"* (Pillay 2004). Hal ini menunjukkan bahwa salah satu musuh utama dalam upaya menegakkan *good governance* adalah tindak pidana korupsi.

Pentingnya media telah diulas oleh beberapa penulis, dari sisi peranannya dalam PEMILU, refleksi kekuasaan, sampai dengan demokrasi dan politik (Chairiyah 2009, Siahaan 2002, Subiyakto 2001, Subiyakto 2005). Pers menjadi salah satu media bagi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan menuju *good governance*. Salah satu tindakan yang kontra dengan *good governance* adalah tindak pidana korupsi yang menjadikan pemerintahan menjadi *bad governance*, tidak akuntabel dan tidak transparan.

Pers menjadi salah satu ujung tombak dalam rangka melawan korupsi.

Media pers lokal dalam memberikan berita tentang tindak pidana korupsi menarik untuk dicermati. Hal ini karena, (1) media pers amat mudah membuat opini publik. Artinya, media pers amat mudah membuat pejabat yang koruptor menjadi personal yang merupakan korban dan patut dikasihani, atau membuat wacana yang remang-remang terhadap suatu kasus sehingga sang koruptor terkesan tidak bersalah; dan (2), media pers bagaimanapun institusi yang penuh kepentingan. Artinya, media pers selain sebagai suara publik juga merupakan media bisnis. Ketika media pers lebih didominasi oleh kepentingan bisnis semata, maka tak heran banyak media yang dapat dibeli oleh pejabat untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya.

Kedua hal di atas senyatanya merupakan bagian dari analisis kritis terhadap pemberitaan media. Naskah yang ditulis oleh media pers lokal tidak lepas dari aras di atas. Sehingga menarik untuk dicermati bagaimanakah media-media pers lokal dalam memberitakan tindak pidana korupsi di tingkat lokal. Naskah media pers lokal yang memberitakan tindak pidana korupsi di tingkat lokal menarik diteliti karena interaksi penulis berita dan pejabat yang korupsi lebih kental. Hal ini berbeda dengan pemberitaan media pers lokal terhadap pejabat pusat yang korupsi. Analisis kritis terhadap isi dari pemberitaan tindak pidana korupsi menjadi menarik karena dapat membuktikan benarkah bahwa pers sebagai salah satu pilar demokrasi telah benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Pers telah menjalankan tugasnya secara baik artinya, pers sebagai alat kontrol sosial, berpihak kepada publik dan kebenaran. Pemberitaan yang independen dan terpercaya mutlak diperlukan dalam membangun *good governance*. Dari uraian di atas, maka beberapa masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah (1) berapakah kerugian publik akibat tindak pidana korupsi di tingkat lokal dalam perspektif media pers lokal?; dan (2) bagaimanakah peran media pers dalam memperkuat *good governance* khususnya dalam memerangi tindak pidana korupsi?

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan analisis isi dari naskah berita tindak pidana korupsi para pejabat publik lokal pada media pers lokal; (2) mengidentifikasi kerugian publik akibat tindak pidana korupsi di tingkat lokal dalam perspektif media pers lokal; dan (3) mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran media pers dalam memperkuat *good governance* khususnya dalam memerangi tindak pidana korupsi.

"...Journalists as a profession appear to be strong ethical thinkers, although there is some variation among individuals in that ability. Education clearly matters, and, as the demographics indicate, journalists as a profession are slowly becoming better educated. Part of that education—whether it is formal or more job based—indicates there is a journalistic domain of knowledge and that journalists think even better about the ethical problems connected with that domain than they do about ethics in general." (Wilkins, 2005: 44).

Good governance dapat tegak jika sendi-sendi demokrasi dapat ditegakkan dengan baik. Salah satu pilar dari demokratisasi adalah adanya pers yang bebas, memihak publik dan independen. Independensi pers ini dapat dibuktikan dengan ikut serta dalam memberikan informasi mengenai penggunaan dana anggaran publik pada alokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pers juga harus meliput tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat publik. Berita yang meliput pejabat-pejabat publik yang terlibat korupsi merupakan upaya pembelajaran kepada publik, bahwa publik berhak mendapatkan informasi mengenai uang yang mereka miliki dan dialokasikan untuk apa saja anggaran publik tersebut. Setiap penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik, harus disosialisasikan sebagai kerugian publik dan rakyat.

Pers harus mengajarkan kepada publik untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pers harus mampu menunjukkan keberpihakan kepada publik dan bukan pro kepada pejabat publik yang korupsi. Hal ini tidaklah mudah, karena harus diakui bahwa pers adalah sebuah institusi yang penuh kepentingan. Namun, jika pers mampu bertahan mempertahankan idealismenya sebagai penyuar kebenaran maka pers akan tegak sebagai pilar demokrasi, dan *good governance*.

Pers sebagaimana diungkapkan oleh Fernando (2006) merupakan media yang cukup ampuh dalam meningkatkan *trust* (tingkat kepercayaan) publik kepada pemerintahnya. Salah satu yang menyebabkan meningkat atau menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah adalah berita tentang skandal pegawai pemerintah tentang korupsi. Sehingga, pers merupakan media yang amat berpengaruh dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintahan yang bersih dari korupsi akan meningkatkan citra positif pemerintah di media massa, yang akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahnya. Pemerintahan yang korupsi akan meningkatkan citra negatif pemerintah di media massa, dan akan menurunkan

tingkat kepercayaan dan wibawa pemerintah. Pers merupakan media yang ampuh dalam melawan tindak pidana korupsi.

"Another fundamental characteristic of critics is their independence from the producers of cultural goods. Critics are expected to be free to choose which work to review and to evaluate them on the basis of merit. The critic therefore has been seen as the "ideal-type" of independent actor – resistant to all forms of economic, political and religious influence" (Bera dalam Debenedetti 2006).

Analisis kritis berbeda dengan metode penelitian yang lain, seperti penelitian positivistik. Dalam pandangan positivistik, peneliti tidak diperbolehkan memberikan penilaian kepada objek yang akan diteliti. Hal yang berbeda akan dilakukan oleh paradigma kritis, penelitian ini pertama kali justru memunculkan nilai atau moral tertentu. Dengan posisi dan pilihan moral semacam itu, teks akan ditafsirkan dalam perspektif yang diyakini oleh peneliti (Eriyanto 2006: 59–60). Salah satu keunggulan analisis kritis adalah peneliti dapat menghindari pengaruh dari *"produces of cultural goods"* yang dapat menimbulkan keragu-raguan dalam memihak nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh peneliti.

Naskah berita tindak pidana korupsi pada media pers lokal jika ditilik lewat analisis kritis pun tidak lepas dari nilai dan moral peneliti. Nilai dan moral peneliti dalam penelitian ini adalah media pers lokal harus pro kepada publik, mencoba menjelaskan

hal yang senyatanya terjadi tentang tindak pidana korupsi yang sedang terjadi dan tidak memihak kepada sang koruptor. Wartawan atau penulis berita dengan demikian didudukkan sebagai seorang aktor yang penuh kepentingan dan dapat melakukan hal apapun demi melakukan pencitraan opini publik.

Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress dan Tony Trew adalah sekelompok pengajar di Universitas East Anglia yang mengetengahkan buku *"Language and Control"* pada tahun 1979. Pendekatan yang kemudian dikenal dengan *critical linguistics* ini memandang bahasa sebagai praktek sosial. Madzhab ini menyatakan bahwa tata bahasa atau *grammar* tertentu dan pilihan kosakata membawa implikasi dan ideologi tertentu. Beberapa hal yang dapat ditransfer untuk menilai naskah berita tindak pidana korupsi pada media pers lokal antara lain:

Metode

Penelitian dengan metode analisis isi digunakan penelitian ini dengan harapan dapat mendeskripsikan isi dari naskah berita tindak pidana korupsi para pejabat publik lokal pada media pers lokal secara kritis, mampu mengidentifikasi kerugian publik akibat tindak pidana korupsi di tingkat lokal dalam perspektif media pers lokal, serta mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran media pers dalam memperkuat *good governance* khususnya dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Tabel 2.
Adaptasi Analisis Kritis Naskah Berita Tindak Pidana Korupsi pada Media Pers Lokal

Kosakata	Membuat Klasifikasi	Pro Kepada Publik Pro Kepada Koruptor	Korupsi adalah masalah publik Korupsi adalah masalah internal
	Membatasi pandangan	Pro kepada Publik Pro kepada Koruptor	Korupsi, penggelapan uang rakyat Insiden, masalah (kosakata penghalusan)
	Marjinalisasi	Pro kepada Publik Pro kepada Koruptor	Pejabat X terbukti mengkorupsi uang rakyat. Uang negara dikorupsi pejabat yang suka hidup mewah
Tata Bahasa	Aktif	Pro kepada Publik	Pejabat X mengkorupsi uang rakyat
	Pasif	Pro kepada Koruptor	Uang kas milik pemda digunakan oleh pejabatnya sendiri
	Verba	Pro kepada Publik	Seorang pejabat mengkorupsi uang rakyat sejumlah 10 juta.
	Nominalisasi	Pro kepada Koruptor	Korupsi menimpa uang kas pemda sejumlah 10 juta.
	Efek Bentuk kalimat pasif:	Pro kepada Publik Pro kepada Koruptor	Pejabat X mengkorupsi uang rakyat sejumlah 100 juta. Dalam masalah ini, uang rakyat sejumlah 100 juta dikorupsi oleh Pejabat Pemerintah.
	Penghilangan Pelaku		
	Efek Nominalisasi:	Pro kepada Publik	Dalam kasus korupsi ini, Pejabat X mengkorupsi uang rakyat sejumlah 100 juta.
	Penghilangan Pelaku	Pro kepada Koruptor	Dalam kasus korupsi ini, uang rakyat sejumlah 100 juta mengalami penggelapan.

Sumber: Diadaptasi ke dalam contoh naskah berita tindak pidana korupsi dari *critical linguistics* – Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress dan Tony Trew dalam Eriyanto, 2006–cetakan kelima: 133–164

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan acuan dalam penentuan fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah, (1) analisis isi dari naskah berita tindak pidana korupsi para pejabat publik lokal pada media pers lokal; (2) identifikasi kerugian publik akibat tindak pidana korupsi di tingkat lokal dalam perspektif media pers lokal; dan (3) identifikasi dan deskripsi peran media pers dalam memperkuat *good governance* khususnya dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Sasaran penelitian ini adalah media pers lokal yang terbit di wilayah eks karesidenan Banyumas yaitu Radar Banyumas. Penelitian ini mencakup setiap berita atau opini yang disampaikan oleh media pers lokal dalam memberitakan tindak pidana korupsi di tingkat lokal (eks karesidenan Banyumas). Media pers lokal yang diteliti adalah koran harian Radar Banyumas yang terbit selama dua bulan dalam masa penelitian. Alasan memilih dua media pers lokal ini adalah karena kedua media ini adalah media pers lokal yang paling terkemuka di kabupaten Banyumas dan diyakini oleh peneliti dapat menggambarkan respon media lokal terhadap tindak pidana korupsi di tingkat lokal.

Dalam penelitian kualitatif data diolah secara reflektif oleh peneliti terutama oleh peneliti yang terlibat langsung dalam pengumpulan data bersama informan yang diteliti. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikompilasi dan diperiksa. Apabila belum mencukupi, data ditambah dengan terjun kembali ke lapangan sesuai dengan kebutuhan. Penambahan data masih bisa dilakukan ketika kekurangan data diidentifikasi semasa analisis ataupun penulisan laporan. Hal ini dimungkinkan terutama apabila datanya adalah data kualitatif (Miles & Huberman 1992:20).

Berbeda dengan penelitian kualitatif, dalam penelitian paradigma kritis, peneliti mendasarkan diri pada penafsiran peneliti pada teks. Paradigma kritis lebih ke penafsiran karena dengan penafsiran didapatkan dunia yang dalam, masuk menyelami teks, dan menyingkap makna yang ada di baliknya. Paradigma kritis memandang manusia bukanlah robot atau mesin yang tidak berubah dan dapat diprediksikan. Setiap orang memiliki penafsiran yang beragam atas suatu masalah. Dalam pandangan kritis, bukan dengan reliabilitas dan validitas mutu sebuah penelitian diukur. Penelitian dalam pandangan kritis dipandang baik jikalau peneliti

mampu memperhatikan konteks sosial, ekonomi, politik dan analisis komprehensif lain. Dengan cara demikian, penafsiran subjektif yang dilakukan oleh peneliti bisa kuat, karena interpretasi yang dilakukan mampu menutup kemungkinan adanya interpretasi lain (Eriyanto 2006:61–64).

Hasil dan Pembahasan

Radar Banyumas adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis pers atau surat kabar. Terbit setiap hari, jumlah 16 halaman *full colour*, tiras 20.000 eksemplar. Beredar di wilayah Jawa Tengah Indonesia, khususnya Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara. Banyumas dan sekitarnya kini menjadi incaran para investor, karena kota-kota tersebut bakal menjadi mutiara dari selatan. Bagi para pemilik perusahaan *consumer goods* maupun jasa, cukup efektif memasang iklan di harian ini (<http://radarbanyumas.indonetwork.co.id/profile/harian-radar-banyumas.htm>).

Selama dua bulan pengamatan, yaitu sejak tanggal 1 September hingga 30 Oktober 2008, Radar Banyumas telah memberitakan 34 berita korupsi. Sehingga rata-ratanya adalah satu berita dalam dua hari. Berita korupsi ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang juga marak di eks-karesidenan Banyumas yang meliputi kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Selain hal tersebut, ini juga membuktikan bahwa Radar Banyumas juga aktif memberitakan kasus korupsi sebagai bentuk fungsi dasar jurnalistik yaitu menjadi suara publik. Jumlah pejabat publik yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi di eks-karesidenan Banyumas adalah sejumlah 369 orang, yang meliputi eksekutif 338 orang, 30 orang dari legislatif dan satu orang dari swasta yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas melalui berita di Radar Banyumas.

Berita yang baik adalah berita yang memuat: apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana dan mengapa? Sehingga jika terdapat informasi yang belum menggambarkan suatu fenomena secara utuh maka dapat dikatakan bahwa berita tersebut kurang informatif. Dalam pemberitaan tindak korupsi oleh Radar Banyumas terdapat informasi yang kurang informatif, misalnya pada kasus kredit fiktif BPR Bank Pasar Kebumen dan korupsi di Kebumen yang pembaca tidak dapat mengidentifikasi pelaku. Hal ini menjadi penting untuk dicermati karena pemberitaan tindak pidana korupsi yang kurang informatif justru memicu "ketidaksengajaan" pro kepada koruptor, karena sang koruptor seakan dilindungi oleh

pewarta. Publik yang berhak mendapatkan informasi mengenai keuangan publik pun dapat dikecewakan dengan pemberitaan yang kurang informatif tersebut, berita seakan dibuat tidak serius dan sambil lewat saja. Pemberitaan yang kurang informatif juga berimbas pada ketidakpercayaan publik terhadap media tersebut.

Selama penelitian berlangsung Radar Banyumas memberikan informasi bahwa korupsi merugikan publik di tingkat lokal sebesar Rp12.300.771.155,00. Angka ini didapat dari menjumlahkan kerugian publik atas setiap kasus korupsi yang diberitakan, dengan mencari angka rata-rata jika terdapat nominal yang berbeda dalam beberapa edisi pemberitaan. Berikut adalah tabel kerugian publik atas korupsi yang ada di Radar Banyumas.

Tabel di atas menjelaskan dua hal utama, yaitu: (1) bahwa jumlah kerugian publik atas korupsi di tingkat lokal (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) terdapat pada level yang cukup tinggi. Sehingga, hal ini memberikan *warning alarm* terhadap bahaya korupsi pada setiap program atau aktivitas pemerintah; dan (2), bahwa jumlah nominal korupsi yang berubah-ubah menjadi krusial, sebab, publik sebenarnya menginginkan pemberitaan yang konsisten dan dapat dipercaya. Angka ini menunjukkan keseriusan pewarta untuk memberitakan kasus korupsi, diketahui oleh publik dan secara bersama-sama mengawasi jalannya proses hukum di pengadilan. Di masa yang akan datang, hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pewarta berita korupsi, yaitu untuk memberitakan tindak pidana korupsi secara jelas dan valid terkait dengan nominal yang dikorupsi dan pelaku tindak pidana korupsi.

Bahasa pemberitaan korupsi menjadi menarik untuk dikaji karena dapat menggambarkan keseriusan media massa untuk berpihak kepada publik dalam

hal perang terhadap korupsi. Hal ini juga bagian dari upaya untuk menegakkan *good governance* khususnya adalah transparansi dan partisipasi publik. Pewarta harus dapat memposisikan aktor korupsi sebagai musuh bersama, dengan cara memberitakan kasus korupsi dengan informatif dan tanpa bias.

Pemberitaan kasus korupsi di Radar Banyumas ternyata dalam penelitian ini masih ragu-ragu dalam memberitakan kasus-kasus korupsi. Sehingga, bahasa yang digunakan pun cenderung bias dan dapat mengakibatkan seakan-akan berita tersebut pro kepada koruptor. Berikut adalah tabel bahasa pemberitaan korupsi dalam Radar Banyumas.

Tabel 4.
Analisis Kritis Naskah Berita Tindak Pidana Korupsi pada Radar Banyumas

Kosakata	Membuat	Pro Kepada Publik	18
	Klasifikasi	Pro Kepada Koruptor	14
	Membatasi	Pro kepada Publik	12
	pandangan	Pro kepada Koruptor	20
	Marjinalisasi	Pro kepada Publik	16
		Pro kepada Koruptor	17
Tata Bahasa	Aktif	Pro kepada Publik	7
	Pasif	Pro kepada Koruptor	25
	Verba	Pro kepada Publik	12
	Nominalisasi	Pro kepada Koruptor	19
	Efek Bentuk		
	kalimat pasif:	Pro kepada Publik	18
	Penghilangan Pelaku	Pro kepada Koruptor	13
	Efek	Pro kepada Publik	11
	Nominalisasi:	Pro kepada Koruptor	21
	Penghilangan Pelaku		

Sumber: Data Primer Diolah 2008

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah bahasa yang digunakan untuk memberitakan korupsi cukup variatif, namun dengan jumlah berita yang pro kepada publik sebanyak 94, dan pro kepada koruptor sebanyak 128. Hal ini tentu saja perlu diperhatikan

Tabel 3.
Kerugian Publik atas (Dugaan) Korupsi di Radar Banyumas

No.	Kasus	Taksiran Berdasarkan Berita yang Berbeda-beda				Jumlah Kerugian Publik
		Nominal 1	Nominal 2	Nominal 3	Rata-Rata	
1	Korupsi dana dekonsentrasi APBN 2007	288.380.000	288.212.000	223.380.000	266.657.330	266.657.330
2	Korupsi KPUD Banjarnegara	274.200.000	273.000.000		273.600.000	273.600.000
3	Korupsi DPRD Banyumas	1.917.000.000				1.917.000.000
4	Vonis Bebas DPRD Banyumas	125.040.000				125.040.000
5	Insentif Pajak Banyumas	4.547.796.165	4.500.000.000		4.523.898.025	4.523.898.025
6	KUT Banjarnegara	37.483.000				37.483.000
7	Kredit Fiktif BPR Bank Pasar Kebumen	1.200.000.000				1.200.000.000
8	Korupsi Kebumen	4.242.000.000				4.242.000.000
TOTAL						12.300.771.155

Sumber: Data Primer Diolah 2008

secara seksama oleh pewarta, bahwa bahasa yang bias dapat menjadikan berita korupsi justru dapat membuat opini bias pada pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya saja penggunaan kata "kecipratan" pada judul artikel "Staf Diknas Ikut Kecipratan" menunjukkan makna tidak sengaja terciprat, sehingga bias dan justru membela orang yang terlibat korupsi.

Radar Banyumas cenderung pro kepada publik ketika jumlah pelaku yang terlibat sedikit dan jumlah nominal yang merugikan publik di bawah 50 juta atau kisaran jutaan rupiah. Pada kasus-kasus seperti ini, pewarta cenderung "menghabisi" sang koruptor. Namun, pada kasus korupsi yang melibatkan banyak aktor dengan jumlah nominal ratusan hingga milyaran rupiah, pewarta cenderung bias dan seakan-akan membela koruptor. Pada pemberitaan yang seperti ini, pewarta nampak sangat hati-hati.

Simpulan

Jumlah pelaku korupsi dan nominal uang yang dikorupsi di tingkat lokal (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) cukup memprihatinkan dan harus menjadi perhatian aparat penegak hukum, aparat pemerintah serta publik di tingkat lokal. Pemberitaan tindak pidana korupsi di Radar Banyumas cukup banyak dan patut diacungi jempol dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi di tingkat lokal. Pemberitaan tindak pidana korupsi di Radar Banyumas ternyata masih banyak menggunakan bahasa yang bias terhadap keberpihakan kepada publik. Bahasa yang digunakan lebih banyak masih ragu-ragu bahkan dapat menimbulkan bias dan pro kepada koruptor.

Pemerintah pusat dan lokal harus dapat membuat sistem yang mencegah oknum aparat pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Radar Banyumas sebagai media pers lokal harus dapat meningkatkan profesionalisme dalam pemberitaan, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana korupsi tingkat lokal. Peningkatan profesionalisme Radar Banyumas dalam memberitakan kasus korupsi dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Arikan, G (2004) Fiscal Decentralization: A Remedy for Corruption? *International Tax and Public Finance*. ABI/INFORM Global 11 (2):175.
- Chairiyah, S (2009) Hubungan antara jenis media yang digunakan dalam PEMILU 2004 dengan perilaku memilih. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 22(1):67–75.
- Debenedetti, S (2006) The Role of Media Critics in the Cultural Industries. *International Journal of Arts Management*. ABI/INFORM Global 8 (3):30.
- Eriyanto (2006) Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Berita. Yogyakarta: LKiS.
- Fernando, K, Bubela, T & Caulfield, T (2006) Public Trust and Regulatory Governance as Represented Through the Media. *Health Law Review*. 15 (1):12.
- Hood, C (2001) Transparency. In: H David (2003) *Fiscal Transparency: Concepts, Measurement, and UK Practice*. *Public Administration* 81 (4):725.
- Ionita, S (2005) Money For Our People? Decentralisation And Corruption In Romania: The Cases of The Equalisation, Infrastructure And Pre-University Education Funds. *Public Administration And Development*. *Public Admin. Dev* 25:251–267.
- Miles B & Huberman, M (1992) *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Pillay, S (2004) Corruption - The Challenge To Good Governance: A South African Perspective. *The International Journal of Public Sector Management* 17 (6/7):586.
- Siahaan, H (2002) Refleksi kekuasaan dalam pemberitaan media cetak: Analisis isi berita utama Pemilu 1999. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 15(3):1–10.
- Subiyakto, H (2001) Sistem media yang demokratis untuk Indonesia baru. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 14(1):61–80.
- Subiyakto, H (2005) Konsentrasi media massa dan melemahnya demokrasi. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 18(1):93–104.
- Wilkin, L & Coleman, R (2005) *The Moral Media: How Journalists Reason About Ethics*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0712/29/nas09.htm>. (2008). [Diakses tanggal 27 Maret 2008].
- <http://www.erasmuslim.com/berita/nas/7124143359-icw-tingkat-korupsi-2006-naik-drastis.htm?prev> (2008) [Diakses tanggal 27 Maret 2008].
- <http://radarbanyumas.indonetwork.co.id/profile/harian-radar-banyumas.htm> (2008) [Diakses tanggal 23 Juni 2009].